

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT  
PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) BERAKIBAT HUKUM GANTI KERUGIAN  
OLEH PT. BANK BNI TBK (PERSERO) PEKANBARU (Dalam Putusan  
Mahkamah Agung Nomor : 3733 K/Pdt/2016)**

**RINGKASAN**

MUHAMMAD ADAM FURQON, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berakibat Hukum Ganti Kerugian Oleh PT. BANK BNI TBK (Persero) Pekanbaru (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3733 K/Pdt/2016),. Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H.,M.A., Ph.D, anggota: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Dalam hal kredit Bank dapat saja menunjuk PPAT untuk melakukan mengikatkan terhadap agunan dan jaminan milik Debitur. Mendasarkan pada penunjukkan tersebut apabila PPAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilaksanakannya penunjukkan maka Bank dapat ikut serta bertanggungjawab dalam menanggung kerugian. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Pbr, Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 71/PDt.G/2016/PT. PBR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3733 K/PDT/2016. pada pokoknya menyatakan pihak Bank / Kreditur dan PPAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, Bagaimana Majelis Hakim mengkualifisir syarat-syarat terpenuhinya Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimana hubungan hukum yang terjalin antara PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Pekanbaru dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga berakibat hukum turut serta dalam membayar sejumlah kerugian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3733 K/PDT/2016.

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertimbangan hukum dalam mengkualifisir syarat-syarat terpenuhinya Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3733 K/PDT/2016 telah terpenuhi, namun penulis tidak sependapat, karena Majelis Hakim kurang mempertimbangkan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank/Kreditur. Hubungan hukum yang terjalin antara Bank/Kreditur dan Notaris/PPAT adalah penunjukkan untuk mewakili urusan dalam bentuk surat perintah yang tertulis sehingga berakibat hukum turut serta dalam membayar sejumlah kerugian sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, PPAT, Ganti Kerugian.

ACTS AGAINST THE LAW COMMITTED BY OFFICERS MAKING LAND DEEDS (PPAT) RESULT IN COMPENSATION LAWS BY PT. BANK BNI TBK (PERSERO) PEKANBARU (In Supreme Court Decision Number: 3733 K/Pdt/2016)

SUMMARY

MUHAMMAD ADAM FURQON, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University. ACTS AGAINST THE LAW COMMITTED BY OFFICERS MAKING LAND DEEDS (PPAT) RESULT IN COMPENSATION LAWS BY PT. BANK BNI TBK (PERSERO) PEKANBARU (In Supreme Court Decision Number: 3733 K/Pdt/2016),. Advisory Commission, Chair: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D, members: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

In the case of credit, the Bank may appoint a PPAT to bind the Debtor's collateral and guarantees. Based on this appointment, if PPAT commits an unlawful act by not implementing the appointment, the Bank can take responsibility for bearing the losses. In the Pekanbaru District Court Decision Number 93/Pdt.G/2015/PN.Pbr, Pekanbaru High Court Number 71/PDt.G/2016/PT. PBR and Supreme Court Decision Number: 3733 K/PDT/2016. In essence, it states that the Bank/Creditors and PPAT were proven to have committed acts against the law. The problem raised in this research is, How does the Panel of Judges qualify the requirements for fulfilling Article 1365 of the Civil Code carried out by the Land Deed Making Officer (PPAT) and what is the legal relationship that exists between PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Pekanbaru and the Land Deed Drafting Official (PPAT), which resulted in the law taking part in paying a number of losses in Supreme Court Decision Number: 3733 K/PDT/2016.

The type of research used is normative juridical with the statutory approach, conceptual approach and case approach. This research specification uses prescriptive. The data required in this research is to use secondary data and be analyzed normatively qualitatively.

The results of the research show that the legal considerations in qualifying the requirements for fulfilling Article 1365 of the Civil Code carried out by the Land Deed Drafting Officer (PPAT) in the Supreme Court Decision Number: 3733 K/PDT/2016 have been fulfilled, but the author does not agree, because the Panel of Judges is lacking consider evidence of unlawful acts committed by the Bank/Creditor. The legal relationship that exists between the Bank/Creditor and the Notary/PPAT is an appointment to represent matters in the form of a written order so that the legal result is participation in paying a number of losses in accordance with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code.

Keywords: Unlawful Acts, PPAT, Compensation.